

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penting oleh peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, Adapun bentuk bentuk penelitian terdahulu yang digunakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut :

No	Judul	Temuan	Relevansi
1.	IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	1. Dengan menerapkan program kampung KB seperti Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), upaya pencegahan stunting diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengonsumsi makanan yang	1. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan. 2. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan pemberdayaan di Kampung KB .

		<p>seimbang, dimulai dari keluarga.</p> <p>2. Kampung KB adalah salah satu "senjata pamungkas" pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah yang jarang "terlihat" oleh pemerintah.</p>	
2.	<p>HUBUNGAN PAPARAN INFORMASI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TERHADAP PENGETAHUAN DAN</p>	<p>1. Paparan informasi mengenai Kampung KB 93,5% sudah pernah diterima masyarakat.</p> <p>2. Penerimaan Kampung KB sebagian besar</p>	<p>1. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan pemberdayaan di Kampung KB .</p> <p>2. Bisa dijadikan acuan agar program Kampung Keluarga Berkualitas di</p>

	<p>PENERIMAAN MASYARAKAT KOTA DENPASAR</p>	<p>responden (79 %) menerima dengan baik adanya program Kampung KB di Desa tempat tinggal responden.</p> <p>3. Terdapat 13,1% yang menyatakan bahwa tidak terlibat dalam pemberian informasi mengenai proses pembentukan Kampung KB di desa tempat tinggal.</p> <p>(Pradnyani, Indrayathi, & Swandewi, 2023)</p>	<p>Surabaya bisa berjalan dengan lebih optimal.</p>
<p>3.</p>	<p>EVALUASI PROGRAM</p>	<p>1. Implementasi program kampung</p>	<p>1. Relevansi dari penelitian ini adalah,</p>

<p>KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KUNIR SEJAHTERA DI DESA KEDUNGJAYA KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON)</p>	<p>keluarga berkualitas di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya berjalan optimal.</p> <p>2. Berdasarkan indikator efisiensi program kampung keluarga berkualitas kunir sejahtera dapat dikatakan belum efisien, karena kurang didukung dengan ketersediaan sumber dana yang memadai</p>	<p>sama sama melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan.</p> <p>2. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan pemberdayaan di Kampung KB .</p> <p>3. Bisa dijadikan acuan agar program Kampung Keluarga Berkualitas di Surabaya bisa berjalan dengan lebih optimal.</p>
--	--	---

		<p>3. Berdasarkan indikator ketepatan kampung keluarga berkualitas kunir sejahtera dampak positifnya ada, tetapi masyarakat tidak berusaha mencari alternatif lain agar program terus berlangsung (Resnawaty, Humaedi, & Adiansah, 2021)</p>	
4.	<p>Kampung KB Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat/ Keluarga di Jawa Timur (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Bondowoso)</p>	<p>1. Kebijakan untuk kampung KB sudah didukung mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan</p>	<p>4. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan</p> <p>5. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan</p>

		<p>sampai ke tingkat RW/RT.</p> <p>2. Jumlah PLKB/PKB masih belum proporsional, namun setelah adanya kampung KB ini seluruh PLKB/PKB bahu membahu untuk mensukseskan program KKBPK di wilayah tersebut dan dibantu kader yang begitu antusias untuk mensukseskannya.</p> <p>3. Terdapat peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan</p>	<p>pemberdayaan di Kampung KB</p> <p>6. Membahas hasil program pemberdayaan secara keseluruhan, bukan hanya beberapa sub program Kampung KB</p>
--	--	---	---

		<p>advokasi KIE dan pergerakan, dulu PKB/PLKB jarang berkunjung di wilayah kampung KB setelah wilayahnya terpilih menjadi kampung KB menjadi sering berkunjung, juga membentuk kelompok kegiatan baru dan pertemuannya sudah secara berkala, serta pelayanan posyandu untuk meningkatkan pelayanan KB.</p> <p>(Mardiyono, 2017)</p>	
--	--	---	--

5.	<p>Pendampingan Masyarakat dalam Meningkatkan UMKM dan Pembinaan Sarana Administratif Rumah Dataku di Kampung Keluarga Berkualitas (KB) “Melati” Kelurahan Blotongan Kota Salatiga</p>	<p>1. Kapasitas para pelaku UMKM di Kampung KB “Melati” telah ditingkatkan melalui pelatihan dan lokakarya yang didampingi oleh pelaku usaha yang profesional.</p> <p>2. Kegiatan pengabdian masyarakat ini membantu UMKM yang ada di Kampung KB “Melati” untuk memiliki media promosi berupa video company profile yang berisi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM</p>	<p>1. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan</p> <p>2. Relevansi dari penelitian ini adalah, sama sama melakukan pemberdayaan di Kampung KB</p>
----	--	---	--

		<p>sehingga dapat lebih dikenal luas melalui media sosial.</p> <p>3. Kampung KB “Melati” Kelurahan Blotongan yang bersifat integratif, sinergis dan lintas sektoral dalam mewujudkan kampung berkualitas dalam pengembangan yang bersifat lintas sektoral. (Dina Anike Lumendek, 2021)</p>	
--	--	--	--

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Adisasmita Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu, masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Menurut Widiowati (2009:155) pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan, dikatakan sebagai proses karena pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberadaan kelompok lemah dalam masyarakat. Dalam pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang atau kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang atau kelompok yang diberdayakan.

Pemberdayaan masyarakat, menurut Eko (2004:11), adalah upaya dan proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan potensi, meningkatkan partisipasi, membangun peradaban, dan mempromosikan kemandirian masyarakat. Dengan mempertimbangkan definisi sebelumnya, kita dapat mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat kerkemampuan atau berkekuatan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk memandirikan masyarakat dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga swasta yang berfokus pada pemberdayaan

masyarakat, harus dipandang sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sering kali di implementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dijelaskan oleh Zubaedi (2007:18) sebagai berikut :

- a. Pogram-pogram pembangunan yang meningkatkan anggota masyarakat memperoleh daya dukungan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya;
- b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutruhankebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab.

Menurut Suharto (Dalam Widiowati 2009:155), pemberdayaan mengacu pada kemampuan individu, terutama kelompok yang rentan dan lemah, untuk memiliki kekuatan atau kemampuan.

Kekuatan atau kemampuan yang dimaksud meliputi:

- a. memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk memiliki kebebasan, yaitu kebebasan bukan hanya untuk mengemukakan pendapat, tetapi juga untuk bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesengsaraan;
- b. Menjangkau sumber yang menghasilkan uang, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan;
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang berdampak padanya. Program pemberdayaan masyarakat yang

didanai harus mencakup elemen yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, program tersebut harus dapat mengajarkan masyarakat untuk mengelola aktivitas mereka secara ekonomis daripada konsumtif.

Dalam sejarahnya, Setelah pergeseran penyelenggaraan demokrasi pada tahun 1998, banyak hal berubah. Ini terutama berdampak pada sistem dan kekuasaan pemerintah, yang sebelumnya menggunakan sistem sentralistis sebelum beralih ke sistem otonomi daerah atau desentralisasi. Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 5 Tahun 1974, perubahan tersebut menjadi lebih jelas. Perubahan mendasar ini benar-benar berdampak besar pada beberapa sektor pelaku pembangunan, termasuk pelaku, pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Ini terlihat dari praktik penyelenggaraan yang buruk, seperti kurangnya kreativitas dan kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang kritis dan rasional.

2.2.2 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Kesuksesan program pemberdayaan membutuhkan prinsip-prinsip seperti yang dijelaskan Najiati (2005:54), terdapat empat prinsip yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasannya :

- Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama dari pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Dinamika yang dibangun dalam hubungan kesetaraan adalah dengan mekanisme berbagi pengetahuan dan pengalaman juga keahlian secara dua arah. Masing-masing saling berbagi kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses pembelajaran.

- Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat memberikan stimulus terhadap kemandirian masyarakat adalah program yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program yang dilaksanakan dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat sendiri. Untuk dapat mencapai tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang berkomitmen untuk mencapai masyarakat yang berdaya.

- Kemandirian

Prinsip kemandirian adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Konsep ini memandang masyarakat memiliki potensi dan kemampuan yang sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar tentang pengetahuan yang

mendalam tentang kendala-kendala yang dimiliki, mengetahui situasi dan kondisi lingkungan, memiliki tenaga kerja dan kemauan, dan memiliki norma-norma yang berlaku bermasyarakat. Potensi-potensi tersebut harus dimanfaatkan dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain bersifat materiil dipandang sebagai penunjang sehingga tidak membuat masyarakat menjadi tingkat kemandirian.

- **Berkelanjutan**

Program-program pemberdayaan yang dilakukan harus berkelanjutan. Meskipun setiap program pemberdayaan selalu melibatkan peran pendamping dalam pelaksanaannya, namun program pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat berkurang dan hilang seiring kemampuan masyarakat yang terus berkembang dalam mengelola program yang ada.

"Prinsip" adalah kata yang berarti "asas", yaitu suatu kebenaran yang menjadi dasar untuk bertindak, berpikir, dan bertindak seseorang (Kamus Bahasa Indonesia, 2008). Dalam hal pemberdayaan, prinsip adalah suatu komitmen yang telah direncanakan dan diputuskan oleh semua pemilik saham untuk mencapai tujuan. Aswas (dalam Bito et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat setidaknya beberapa prinsip yang membentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh pelaku dan masyarakat binaannya sebagai dasar, sehingga program pemberdayaan yang dimaksud dapat memenuhi

kebutuhan masyarakat binaan dan sesuai dengan konsep dan hakikat pemberdayaan. Adapun prinsip yang dimaksud adalah:

1. Dilakukan secara demokratis dan tulus.
2. Program kegiatan pemberdayaan harus didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sumber daya masyarakat binaan. Pada titik ini, membutuhkan partisipasi masyarakat binaan untuk melakukan identifikasi dan sosialisasi.
3. Menempatkan masyarakat binaan sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan sehingga mereka dapat membantu menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk pemberdayaan yang tepat.
4. Merevitalisasi modal sosial seperti kearifan lokal yang tercermin dalam nilai-nilai budaya, gotong royong, saling menghargai, dan saling menghormati.
5. Dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.
6. Memperhatikan keragaman tradisi yang mengakar kuat di masyarakat binaan.
7. Memperhatikan aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat binaan.
8. Diskriminasi tidak ada, terutama pada kaum perempuan.

Karena mereka adalah ujung tombak langsung yang berhadapan dengan berbagai karakteristik dan pola masyarakat, pelaku pemberdayaan masyarakat harus memahami dan memiliki sikap yang telah dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak pendidikan nasional. Adapun ide-ide yang dia tawarkan adalah

1. *Hing ngarsa sung tulada* (berada di depan) memiliki kemampuan untuk memberikan suri tauladan atau contoh bagi masyarakat binaan.
2. *Hing madya mangun karsa* (berada di tengah) memiliki kemampuan untuk mendorong segala kemampuan, termasuk inovasi berinisiatif, kreatifitas, dan keinginan untuk terus mengembangkan dan memajukan masyarakat binaan.
3. *Tut wuri handayani* (berada di belakang) bersedia membuka diskusi dan menghargai berbagai perspektif dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat binaan.

2.2.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan-tujuan yang dijelaskan menurut Mardikanto (2017:202) terdapat enam tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Perbaikan kelembagaan masyarakat diharapkan mampu memperbaiki pengembangan *networking* kemitraan usaha.

2. Perbaikan usaha (better business). Perbaikan sistem pendidikan, perbaikan terhadap aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan mampu memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan pendapatan (better income). Perbaikan bisnis atau pendapatan yang berhasil dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan dari tiap-tiap masyarakat.

4. Perbaikan lingkungan (better environment). Perbaikan fisik dan sosial lingkungan diharapkan dapat terjadi ketika perbaikan pendapatan bisa terwujud. Hal ini karena seringkali penyebab kerusakan lingkungan adalah berawal dari kemiskinan dan tingkat pendapatan yang rendah.

5. Perbaikan kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan kondisi lingkungan yang berubah menjadi lebih baik dirapkan mampu memperbaiki keadaan kehidupan setiap masyarakat.

2.2.4 Sejarah Kampung KB

Pada 14 Januari 2016, Presiden Republik Indonesia mendeklarasikan Kampung Keluarga Berkualitas di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ini awalnya dikenal sebagai Kampung Keluarga Berencana. Tidak adanya kebijakan dan prosedur tertulis yang mengatur keterlibatan lintas sektor dalam program Kampung KB menyebabkan pelaksanaannya kurang efektif, meskipun ada banyak program dan kegiatan berbasis desa yang dapat bersinergi dengan program Kampung

KB. Akibatnya, pada tahun 2020, Surat Edaran Kemendagri No. 843.4/2879/SJ tanggal 15 April 2020 mengubah Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berencana.

Inpres Nomor 3 tahun 2022 bertujuan untuk membuat pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas lebih efisien. Ini akan menjadi inisiatif bersama setingkat desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara konvergen dan terintegrasi untuk mendorong dan memperkuat institusi keluarga dalam segala aspeknya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat. Saat ini, 1.850 desa atau kelurahan di Jawa Timur, atau sekitar 21 persen desa atau kelurahan di Indonesia, memiliki Kampung Keluarga Berkualitas.

2.2.5 Tujuan Kampung KB

Salah satu tujuan umum pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), serta membangun sektor terkait untuk menciptakan keluarga kecil yang unggul. Tujuan khusus Kampung KB adalah:

1. Meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program

Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dengan sektor terkait meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan;

2. Meningkatkan jumlah peserta kontrasepsi (KB) aktif modern;
3. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
4. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
5. menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan lain-lain. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2021)

2.2.6 Ruang Lingkup Kampung KB

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi Kependudukan; Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga); dan Kegiatan lintas sektor (Bidang Pertanian, Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya) disesuaikan dengan kebutuhan wilayah kampung KB.) Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam

suatu wilayah, yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, dan partisipasi aktif masyarakat. (BKKBN, 2021)

Walaupun BKKBN bertanggung jawab untuk mendirikan Kampung KB, pada dasarnya Kampung KB adalah hasil dari kerja sama antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah daerah dan pusat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh karena itu, Kampung KB dimaksudkan untuk berfungsi sebagai miniatur atau representasi dari sebuah desa atau kelurahan. Di dalamnya, program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) diintegrasikan dengan program pembangunan sektor terkait yang diterapkan secara sistematis. Saat ini, Kampung KB mencakup berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan anggota kelompok, seperti Pendataan Keluarga, Posyandu, BKB, dan kegiatan lainnya di Banjar atau Kampung. Kegiatan ini direncanakan setiap bulan dan dibina oleh PLKB/PKB yang bertugas di daerah tersebut.

2.2.7 Bina Keluarga Balita Holistik Integratif

Layanan Bina Keluarga Balita membantu orang tua dan anggota keluarga lainnya mengasuh dan membina anak melalui pengembangan fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi diperlukan

untuk meningkatkan keterlibatan dan kemandirian ber-KB bagi pasangan usia subur (PUS). Pengelola dan staf yang bekerja secara sukarela dari masyarakat sekitar menjalankan program BKB. Sebaliknya, kelompok BKB adalah kelompok keluarga muda yang memiliki anak batita (kurang dari tiga tahun) atau anak balita (kurang dari lima tahun).

Untuk membantu kedua kelompok keluarga tersebut, situs web BKKBN menyatakan bahwa seluruh jajaran pembangunan, termasuk kekuatan keluarga yang tergabung dalam Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA), diminta untuk memberi prioritas tinggi kepada kesehatan dan pertumbuhan anak balitanya. Jika penyuluhan BKB berjalan dengan baik, diharapkan orang tua akan menjadi orang tua yang tahu bagaimana menjaga kesehatan, mendidik anaknya, dan mendeteksi kelainan atau kecacatan sejak dini. Pada akhirnya, penyuluhan ini akan menyiapkan anak balitanya untuk sekolah bersama anak-anak lain.

2.3 Kajian Teori

Jim Ife menyatakan bahwa pemberdayaan berarti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian kepada komunitas untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Selain itu, Jim Ife menyatakan bahwa pemberdayaan berarti memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian kepada komunitas sehingga

mereka dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sering kali di implementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dijelaskan oleh Zubaedi (2007:18) sebagai berikut :

- a. Pogram-pogram pembangunan yang meningkatkan anggota masyarakat memperoleh daya dukungan dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya;
- b. Kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutruhankebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab.

Menurut Suharto (Dalam Widiowati 2009:155) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan, adapun kekuatan atau kemampuan yang dimaksud menurut Suharto (Dalam Widiowati 2009:155) meliputi:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk memiliki kebebasan, yang berarti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesengsaraan;
- b. Menjangkau sumber daya produktif untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan; dan

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Program pemberdayaan masyarakat yang didanai harus mencakup elemen yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, program tersebut harus dapat mengajarkan masyarakat untuk mengelola aktivitas mereka secara ekonomis dan bukannya konsumtif.

Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Oleh karena itu, untuk berhasil mencapai tujuan, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus dilandasi dengan strategi kerja tertentu.

Dalam pengertian sehari-hari, strategi biasanya didefinisikan sebagai tindakan atau langkah-langkah tertentu yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau penerima manfaat yang diinginkan. Akibatnya, pengertian strategi seringkali rancu dengan pengertian metode, teknik, atau taktik. Tentang hal ini, secara konseptual strategi sering diartikan dengan beragam pendekatan, diantaranya:

1) Strategi sebagai suatu rencana: Strategi adalah garis besar yang akan digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Strategi sebagai kegiatan: Strategi adalah upaya yang dilakukan oleh setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam hal ini, strategi selalu memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman dari luar.

Tiga cara berbeda dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang lemah. Yang pertama adalah melalui pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan membangun atau mengubah lembaga dan struktur yang dapat memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah melalui aksi sosial dan politik, yaitu dengan melakukan perjuangan politik dan gerakan untuk membangun kekuasaan yang efektif. Untuk meningkatkan kekuatan masyarakat bawah, upaya ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada mereka.

